

KONSEP KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Nur Widiatul Jannah¹, Fitri Jannah², Riyan Adri³, Rizki Ananda⁴
^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
nrwidiatuljannah@gmail.com¹,
jannahfitri106@gmail.com², Riyanadri593@gmail.com³,
rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id⁴

ABSTRACT

Education policy is important in the process of achieving national education goals. national education so that an understanding of the basic concepts of education policy is needed to produce proactive and problem-solving education policies. The purpose of writing this article is to examine the scope of education policy which consists of understanding the concept of education policy, characteristics of education policy, objectives of education policy, and functions of education policy. This writing methodology uses the literature study method. The writing of this article is done by reviewing several journals and books related to the concept of policy and education policy. The results of the study found that education policy is closely related to the field of education because the policy guides the development of the vision and mission of education to achieve academic goals through strategic implementation in the field of education. The characteristics of education policy are that it has educational objectives, fulfills legal-formal aspects, has operations, is made by the authorities, can be evaluated, and has a systematic approach. The approach to implementing education policy consists of an educational approach consisting of a structural approach, a procedural and managerial approach, a behavioral approach and a political approach.

Keywords: concept, policy, education

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan merupakan hal yang penting dalam proses pencapaian tujuan pendidikan nasional. pendidikan nasional sehingga pemahaman tentang konsep dasar kebijakan pendidikan sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang proaktif dan pemecahan masalah. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji ruang lingkup kebijakan pendidikan yang terdiri dari pengertian Konsep kebijakan pendidikan, karakteristik kebijakan pendidikan, Tujuan kebijakan pendidikan, dan Fungsi kebijakan pendidikan. Metodologi penulisan ini menggunakan metode studi literatur. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji beberapa jurnal dan buku yang berkaitan dengan konsep kebijakan dan kebijakan pendidikan. Hasil kajian menemukan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan pendidikan terkait erat dengan bidang pendidikan

karena kebijakan tersebut memandu pengembangan visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan akademik melalui implementasi strategis dalam bidang pendidikan. Karakteristik kebijakan pendidikan adalah yaitu memiliki tujuan pendidikan, memenuhi aspek legal-formal, memiliki operasional, dibuat oleh pihak yang berwenang, dapat dievaluasi, dan memiliki pendekatan yang sistematis. Pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan terdiri dari pendekatan pendidikan terdiri dari pendekatan struktural, pendekatan prosedural dan manajerial, pendekatan pendekatan perilaku dan pendekatan politik.

Kata Kunci: konsep, kebijakan, pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu upaya menyeluruh yang menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini mencakup dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, kesehatan, sosiologis, psikologis, dan bahkan agama. Manajemen pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan seluruh dimensi ini agar dapat menerapkan strategi dan kebijakan yang selaras dengan tujuan pendidikan Indonesia. Kebijakan pendidikan ditetapkan untuk mendukung dan memberdayakan pendidik dan masyarakat dalam mendorong pendidikan inovatif. Pencapaian tujuan ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk pendidik, siswa, tujuan pendidikan, lingkungan, dan sumber daya. Jika salah satu komponen ini menghadapi tantangan, sistem pendidikan mungkin akan gagal mencapai hasil yang diharapkan.

Indonesia telah mengalami banyak perubahan kebijakan pendidikan untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya (Farkhan et al., 2022).

Pada tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang dikenal sebagai UU 20, disahkan, yang menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kebijakan strategis. Kualitas pendidikan berdampak langsung pada pemenuhan tujuan-tujuan tersebut, yang ditegakkan melalui kepatuhan terhadap standar pendidikan yang ditetapkan. Jelas terlihat bahwa kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk pengelolaan sistem pendidikan, yang menyoroti pentingnya menyelaraskan kebijakan dengan tujuan pendidikan. Sebagai pengelola pendidikan, pemerintah

harus secara proaktif mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mampu mengatasi tantangan dan memfasilitasi realisasi tujuan pendidikan. Memahami rumitnya sistem pendidikan sangat penting bagi administrator pendidikan untuk merancang strategi efektif yang selaras dengan lanskap pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan pilar penting dalam eksistensi manusia, berfungsi sebagai saluran untuk membentuk karakter dan membuka potensi diri kita sepenuhnya. Sifat multidimensi umat manusia sangat terkait dengan kualitas pendidikan yang kita terima, sehingga menyoroti dampak besar yang ditimbulkannya terhadap perkembangan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan landasan pertumbuhan dan kemajuan manusia (Wardhana & Pratiwi, 2020).

Pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang cerdas untuk membantu anak-anak belajar lebih baik di sekolah. Mereka harus siap untuk memperbaiki setiap masalah yang muncul sehingga setiap orang dapat mencapai tujuan belajarnya. Berbicara mengenai sistem pendidikan ibarat membicarakan

sebuah teka-teki besar. Penting bagi masyarakat yang mengambil keputusan mengenai pendidikan untuk memahami peraturan dan pedoman sehingga mereka dapat mengambil pilihan yang baik untuk sekolah di Indonesia (Elwijaya et al., 2021).

Di era Masyarakat 5.0, individu harus memiliki kemampuan untuk secara efektif mengatasi berbagai masalah sosial yang rumit. Ketika tantangan menjadi semakin rumit dan meluas, pendidikan muncul sebagai katalis penting bagi transformasi masyarakat. Dengan memupuk budaya pembelajaran dan kolaborasi berkelanjutan, memanfaatkan beragam sumber daya pendidikan di seluruh platform digital, merangkul kemajuan teknologi dan kemajuan kurikulum global, kita benar-benar dapat memanfaatkan kekuatan inovasi digital untuk mendorong kemajuan dan perubahan positif (Rozak & Az-Ziyadah, 2021).

Dengan mengenali dan mengatasi tantangan-tantangan ini, Kebijakan Pendidikan berfungsi sebagai landasan penting untuk memberikan panduan dan koherensi di sektor pendidikan. Hal ini harus dirancang dengan tekun dan

dilaksanakan secara efektif oleh semua lembaga pendidikan, sebagai kerangka hukum yang menjamin keterlibatan aktif lembaga-lembaga tersebut dalam pembinaan intelektualitas nasional, sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Metode ini untuk mendapatkan dan mengevaluasi berbagai literatur akademik yang tepat dan fokus pada topik tertentu dengan menghimpun data dari artikel-artikel yang berkaitan dengan Konsep Kebijakan dan Kebijakan Pendidikan (Amiliya & Giantara, 2021). Metode Analisis yang digunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan sebuah bentuk analisis yang berupa penjelasan dan mengeksplorasi ide-ide utama yang berkenaan dengan topik yang dibahas (Priyanto, 2020).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Konsep Kebijakan Pendidikan

Setiap negara mempunyai arti berbeda untuk kata “kebijakan”. Dalam bahasa Inggris artinya rencana atau aturan. Dalam bahasa

Latin, ini berkaitan dengan politik dan bahasa. Dalam bahasa Yunani berarti suatu negara, dan dalam bahasa Sansekerta berarti kota. Kebijakan adalah usulan yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin ada tantangan dan peluang dalam menjalankan suatu kebijakan (RD et al., 2021).

James E Anderson menjelaskan bagaimana suatu rencana/kebijakan tindakan dengan tujuan yang jelas dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memecahkan suatu masalah (Anwar Us & Kompri, 2017).

Kebijakan, berdasarkan prinsip teoritis, mewakili serangkaian keputusan otoritatif yang dibuat oleh pemerintah, yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan melalui rencana dan inisiatif strategis yang akan dilaksanakan (Madjid, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam komunitas atau masyarakat tertentu. Kebijakan yang disusun dengan baik harus

mengutamakan persatuan dan mempertimbangkan kepentingan kolektif masyarakat.

Kebijakan pendidikan diciptakan sebagai jawaban terhadap tantangan dan permasalahan yang muncul dalam bidang pendidikan (Sutapa, 2008). Persoalan ini muncul karena adanya keterputusan antara lembaga pendidikan dan tujuannya (Suyahman, 2016). Penyusunan kebijakan pendidikan melibatkan perencanaan yang cermat dan pelaksanaan strategi untuk memenuhi visi dan misi pendidikan, yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Singkatnya dapat disimpulkan kebijakan pendidikan terkait erat dengan bidang pendidikan karena kebijakan tersebut memandu pengembangan visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan akademik melalui implementasi strategis dalam bidang pendidikan.

b. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Karakteristik berfungsi sebagai artikulasi halus yang menerangi esensi suatu pokok bahasan. Berunding mengenai masalah kebijakan bukanlah tugas yang

mudah; sebaliknya, hal ini memerlukan pertimbangan yang cermat. Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan ketika mendukung suatu kebijakan adalah pemeriksaan yang cermat terhadap rincian yang halus namun signifikan, termasuk ciri-ciri kebijakan pendidikan. Karakteristik ini menjadi batu ujian yang sangat berharga bagi pengambilan keputusan yang tepat dalam membentuk kebijakan pendidikan. Karakteristik kebijakan pendidikan yang disebutkan meliputi 6 karakteristik diantaranya:

1. Memiliki Tujuan Pendidikan

Agar berdampak pada pendidikan secara efektif, kebijakan harus mempunyai tujuan dan berorientasi pada tujuan. Keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada kejelasan tujuan dan keselarasan dengan hasil yang diinginkan.

2. Memenuhi aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan harus diterapkan dengan benar karena kebijakan tersebut harus memenuhi prasyarat yang diperlukan agar dapat diakui dan ditegakkan secara hukum di wilayah tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus mematuhi persyaratan konstitusional sesuai

dengan hierarki undang-undang di suatu negara atau wilayah sebelum dapat diakui dan dinyatakan sah secara resmi. Hanya dengan cara itulah kebijakan pendidikan dapat dianggap sah.

3. Memiliki Konsep Operasional

Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai kerangka penting untuk memandu inisiatif pendidikan, dengan fokus utama pada memberikan hasil yang praktis dan nyata. Kebijakan-kebijakan ini harus diterapkan secara efektif untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Selain itu, kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam memberikan dukungan pengambilan keputusan yang penting.

4. Dibuat oleh yang Berwenang

Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh individu-individu yang ahli di bidangnya masing-masing untuk memastikan bahwa mereka memiliki wewenang dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan perubahan positif tanpa menimbulkan dampak yang merugikan baik pada sektor pendidikan maupun lingkungan sekitar. Administrator pendidikan, pengelola lembaga, dan pengambil kebijakan yang terlibat langsung di bidang pendidikan

merupakan komponen penting dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan.

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan harus diawasi dan diadaptasi untuk memastikan efektivitasnya. Apakah suatu kebijakan berhasil dan harus disempurnakan lebih lanjut, atau mengandung kelemahan yang perlu diatasi, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pendidikan. Proses ini memungkinkan adanya cara yang sistematis dan efisien untuk menilai dampak dan efektivitas kebijakan pendidikan.

6. Memiliki Sistematisa

Kebijakan pendidikan merupakan sistem kompleks yang memerlukan pendekatan yang jelas dan komprehensif untuk mengatur semua aspek secara efektif. Penting bagi kebijakan untuk bersifat sistematis guna menjamin efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Tanpa sistem yang terstruktur dengan baik, kebijakan pendidikan mungkin menjadi tidak praktis, diskriminatif, atau tidak stabil karena adanya faktor-faktor yang saling bertentangan. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan secara hati-hati

untuk mencegah potensi kelemahan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, kebijakan pendidikan harus diintegrasikan dengan kebijakan lain seperti kebijakan politik, moneter, dan ekonomi untuk memastikan keselarasan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

c. Tujuan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan sangat erat kaitannya dengan tujuan pendidikan. Memiliki tujuan yang jelas dalam pendidikan membantu memandu pengembangan kebijakan. Kebijakan pendidikan tidak hanya selaras dengan tujuan pendidikan, namun juga bertujuan untuk memberikan keteraturan dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan. Menetapkan dan mencapai tujuan dalam pendidikan memberikan arah dan kejelasan dalam hidup (Farkhan et al., 2022).

Memahami tujuan kita memungkinkan kita mengarahkan energi mental kita menuju tujuan yang nyata, daripada membuangnya tanpa tujuan. Prinsip ini berlaku pada semua aspek kebijakan pendidikan, karena tujuan yang jelas akan menjadi kekuatan panduan bagi upaya kita. Kebijakan pendidikan mencakup beragam komponen, yang

semuanya bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan pembangunan, adapun tujuan kebijakan pendidikan sebagai diuraikan berikut:

1. Tujuan Kebijakan didasarkan pada tingkatan Masyarakat

Melalui pemeriksaan terhadap tujuan pendidikan universal, kita dapat melihat prinsip-prinsip mendasar yang membentuk kebijakan masyarakat. Pendidikan memiliki kekuatan transformatif untuk mengangkat individu sebelum mereka dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Selain itu, pendidikan juga menanamkan nilai-nilai yang menjadi pedoman individu dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, pendidikan merupakan batu loncatan penting menuju peningkatan harkat dan martabat manusia, sebuah upaya yang tiada hentinya.

2. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan politisi

Dalam menganalisis tujuan kebijakan berdasarkan hierarki politisi, dampak pendidikan terhadap kemajuan politik di berbagai strata sosial menjadi jelas. Pendidikan memainkan peran penting dalam menumbuhkan nilai-nilai

kewarganegaraan yang positif dan kompetensi di kalangan siswa, mendorong pengembangan warga negara yang berpengetahuan dan teliti. Individu yang berpendidikan siap untuk memahami nuansa otoritas dan pemerintahan, sehingga membentuk perspektif dan karakter mereka menuju etos yang lebih demokratis. Lebih jauh lagi, pendidikan menanamkan rasa kesadaran dan akuntabilitas yang tinggi, membedakan negara dan masyarakat yang dipimpin oleh individu terpelajar dari mereka yang tidak memiliki pencapaian pendidikan.

3. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan ekonomi

Penting bagi kita untuk mempertimbangkan bagaimana tujuan kebijakan dapat diwujudkan melalui analisis indikator ekonomi. Dengan mengkaji pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang, kita dapat mengungkap alasan pendekatan ini:

a. Pendidikan berfungsi sebagai katalisator kemajuan ekonomi, membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan hidup yang penting. Jelas terlihat bahwa individu dengan tingkat

pendidikan yang lebih tinggi cenderung mencapai kesejahteraan finansial yang lebih besar, karena peningkatan produktivitas membedakan mereka dari rekan-rekan mereka yang berpendidikan lebih rendah.

b. Berinvestasi di bidang pendidikan menghasilkan laba atas investasi yang lebih tinggi dibandingkan investasi fisik di bidang lain. Nilai pengembalian pendidikan berfungsi sebagai ukuran anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pendidikan dan pendapatan yang dapat diharapkan diperoleh ketika seseorang memasuki dunia kerja (Kasmeni et al., 2020)

d. Fungsi kebijakan Pendidikan

Tujuan kebijakan pendidikan adalah sebagai kerangka strategis untuk memandu tindakan dan mengelola kegiatan dalam lembaga pendidikan dan masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan, memastikan pendekatan yang kohesif terhadap pengambilan keputusan dan implementasi di semua tingkat

pendidikan dan organisasi (Angelika, 2019).

UU Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya pengembangan keterampilan, pembentukan karakter, dan pembinaan bangsa yang bermartabat untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat. Undang-undang ini menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam memastikan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas bagi semua warga negara, wajib belajar dasar bagi anak-anak berusia tujuh hingga lima belas tahun, dan penyediaan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan tanpa diskriminasi. Undang-undang ini juga mengamanatkan alokasi anggaran yang tepat untuk menjamin pendidikan gratis bagi semua orang pada tingkat minimum. Kerangka komprehensif ini menggarisbawahi komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan sejahtera.

E. Kesimpulan

kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam komunitas atau masyarakat tertentu. Kebijakan yang

disusun dengan baik harus mengutamakan persatuan dan mempertimbangkan kepentingan kolektif masyarakat. Kebijakan pendidikan diciptakan sebagai jawaban terhadap tantangan dan permasalahan yang muncul dalam bidang pendidikan.

Karakteristik pendidikan di antaranya adalah: 1) Memiliki Tujuan Pendidikan, 2) memenuhi aspek legal-formal, 3) Memiliki Konsep Operasional, 4) Dibuat oleh yang Berwenang, 5) Dapat dievaluasi, dan 6) Memiliki Sistematis. Penyelarasan komponen dan karakteristik kebijakan di bidang pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan pendidikan yang berkaitan erat dengan tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan sangat penting sebagai landasan dalam menganalisis dan mentaati kebijakan pemerintah saat ini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Madjid, A. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan (A. Cahyanti (ed.)). Samudra Biru.

- Angelika Bule Tawa, "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar," E-Journal.Stp-lpi.Ac.Id, 2019, 107–17.
- Anwar Us, K., & Kompri. (2017). Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (Dahulu, Kini dan Masa Depan). PUSAKA.
- Amiliya, R., & Giantara, F. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. *Al-Abyadh*, 4(2), 116–125.
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67-71.
- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921-1928.
- Fatkuroji, F. (2017). Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu dan Minat Pelanggan Pendidikan. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 28-40.
- Kasmeni, Risma, dan Irmawati, "Analisis peran manajemen kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi dan misi," *Jurnal Mappesona* 3, no. 3 (2020).
- RD, A. H., Subiyantoro, & Putra, R. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Sebagai Suatu Kebijakan Publik: Suatu Analisis Terhadap Kekhususan Kebijakan Pendidikan di Aceh. *Bidayah*, 12(1), 103–125.
- Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Alim| Journal of Islamic Education*, 3(2), 197-208.
- Sutapa, M. (2008). Kebijakan pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan UNY*, 112408.
- Suyahman, S.(2016). Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Atas Dalam Kaitannya Dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 1047-1054.
- Wardhana, I. P., & Pratiwi, V. U. (2020). Konsep pendidikan taman siswa sebagai dasar kebijakan pendidikan nasional merdeka belajar di Indonesia.